

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa satasiun televisi Jawa Pos Media atau yang lebih dikenal dengan JTV, telah terbukti benar tidak melakukan pelanggaran siaran saat menayangkan program bergenre politik. Stasiun televisi ini menjaga akuntabilitas publik dengan menyajikan berita sesuai keadaan yang ada, sesuai dengan aturan yang harus dijalankan. Dari 11 konten tayangan yang telah penulis teliti, tidak terdapat satupun yang menyalahi aturan SK KPU, tidak pula melanggar pedoman siaran yang telah diberlakukan oleh KPI. JTV sangat mengargai perbedaan dengan menyampaikan ajakan untuk menjaga kedamaian menjelang pemilihan legislatif serta pemilihan presiden, hal ini disampaikan disetiap akhir liputan yang ada dengan bahasa yang tenang dan jelas.

Evaluasi formatif yang telah dilakukan penulis mengetahui bahwa JTV pada program acara Pojok 7 masa tayang April sudah membatasi tayangan bernuansa politik meski masa tenang jatuh pada tanggal 14 April 2019. Diketahui dari pemantauan yang ada, mulai tanggal 8 tayangan bernuansa politik kembali menyapa layar kaca. Tepat tanggal 14 April sendiri yang dijadikan masa tenang juga dimanfaatkan oleh JTV sama sekali tidak menayangkan konten politik. Hasil pantauan penulis, Pojok 7 kembali menghadirkan tayangan bernuansa politik pada tanggal 15 April itupun hanya 3 tayangan dan membahas persiapan pemilu serentak diberbagai daerah Jawa Timur. Sedangkan pada tanggal 16 April sehari sebelum pencoblosan, Pojok 7 menayangkan informasi mengenai APK di berbagai daerah yang belum ditertibkan.

Tanda *pause* yang terdapat pada beberapa video menunjukkan bahwa JTV tidak melakukan paksaan kepada narasumber untuk menjawab pertanyaan sesuai arahan wartawan, dalam artian tidak ada arahan dari wartawan untuk narasumber agar menjawab seperti yang ia dan tim inginkan. Tidak ada *agenda setting* dalam kegiatan wawancara tersebut. Wartawan dan tim yang bertugas membiarkan narasumber mengeksplere jawaban mereka masing-masing, maka dari itu terdapat

pause dikala menjawab pertanyaan karena narasumber membutuhkan waktu untuk mencari kata atau kalimat yang sesuai untuk disampaikan kepada khalayak. Memikirkan kata yang sesuai dan tepat agar tidak terjadi multi tafsir pada masyarakat.

Overlaps dan *backchannels* juga menentukan evaluasi formatif ini, dimana dengan adanya *overlaps* peneliti bisa meninjau sejauh mana komunikasi yang terbentuk antara wartawan dengan narasumber. Pada tayangan yang dianalisis oleh penulis, menemukan bahwa *overlaps* yang ada pada setiap wawancara itu menunjukkan bahwa saling melengkapinya narasumber terhadap informasi yang dibutuhkan oleh wartawan dan khalayak. *Backchannels* juga memperlihatkan bahwa tidak adanya suatu *agenda setting* pada tayangan yang diteliti oleh penulis. Ekspresi yang nampak layaknya ekspresi wajar saat wawancara dengan seseorang, tidak ditemukan adanya ekspresi penuh tekanan dalam menjawab pertanyaan wartawan.

Akuntabilitas publik yang merupakan transparansi suatu media dalam menyajikan berita juga diterapkan oleh stasiun televisi JTV. Penerapan akuntabilitas ini bisa dilihat dari evaluatif formatif pada setiap tayangan. Transparansi informasi diberikan kepada khalayak dengan memberikan sajian *admosound* saat melakukan wawancara, meski ada beberapa tayangan yang tidak diperlihatkan sesi wawancaranya dan hanya disebutkan lewat *voice over* saja. Rangkaian percakapan yang terjadi juga teridentifikasi sebagai komunikasi yang wajar tanpa adanya unsur *agenda setting* media JTV.

Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa stasiun JTV menerapkan peraturan dari KPU berupa SK KPU 1096 Tahun 2018 yang merupakan SK peraturan kampanye pada media sosial baik media televisi dan radio serta *new media*. Tidak terdapat unsur pelanggaran yang dilakukan dari 11 tayangan yang penulis evaluasi. Akuntabilitas publik juga dijaga oleh JTV dengan melakukan penerapan melalui *admosound*, *sound bite*, dan *voice over* yang saling menguatkan satu sama lain. JTV memberikan informasi kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan khalayak tanpa ditambahi bumbu politik pemantik kerusuhan.

B. Saran

Penulis menyarankan agar beberapa hal terkait kosongnya tayangan berita politik menjelang masa tenang untuk masa pemilihan 5 tahun yang akan datang, tayangan yang ada pada program acara Pojok 7 sudah cukup baik karena menerapkan aturan SK KPU dan menerapkan aturan siaran P3SPS. Hanya saja alangkah lebih baik sebelum hari tenang tetap menayangkan informasi mengenai kesiapan paslon sebelum memasuki hari tenang. Masyarakat perlu mengetahui menjelang hari tenang kesiapan apa saja yang dilakukan oleh capres dan cawapres, masiakah melakukan kampanye, bagaimanakah atmosfer Jawa Timur dalam menyambut pilpres yang serentak dengan diadakannya pileg. Melihat euforia sebelum hari tenang sebaiknya tetap ada informasi untuk khalayak.

Untuk meningkatkan akuntabilitas publik yang ada, bila ada proses wawancara dalam suatu pencarian informasi sebaiknya ditampilkan kepada khalayak, tidak diwakilkan pada bagian *voice over* karena hal ini sangat menunjang bagi khalayak. Meski *voice over* yang diberikan cukup lugas, tenang tanpa menimbulkan informasi multi tafsir, alangkah lebih baik bila proses wawancara yang ada ditampilkan kepada khalayak.